

2022



LAPORAN KINERJA



**Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Riau**

spasikita.kemdikbud.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BPMP (BPMP) Provinsi Riau berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Riau tahun 2022. BPMP Provinsi Riau pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum BPMP Provinsi Riau telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BPMP Provinsi Riau pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BPMP Provinsi Riau pada tahun 2022.

Pekanbaru, 30 Januari 2023
Kepala BPMP Provinsi Riau



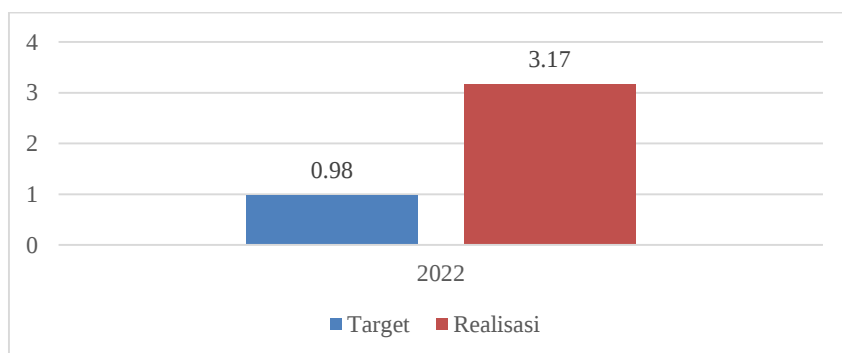
Dr. Wisma Endrimon, M.Pd

Ikhtisar Eksekutif

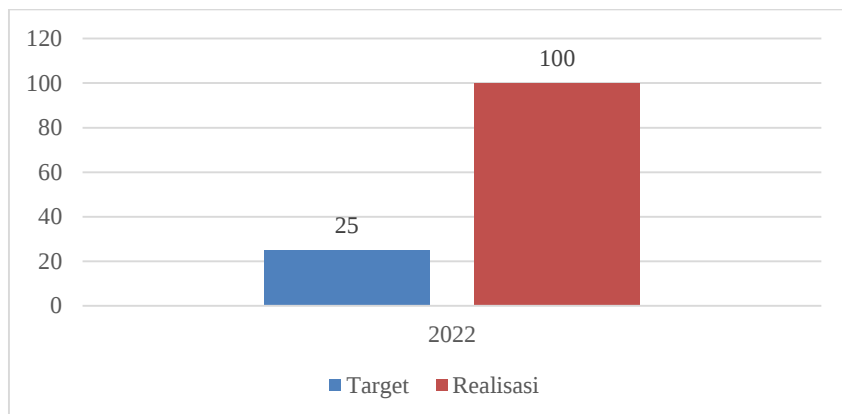
Laporan kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IKK 1.1: Persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya



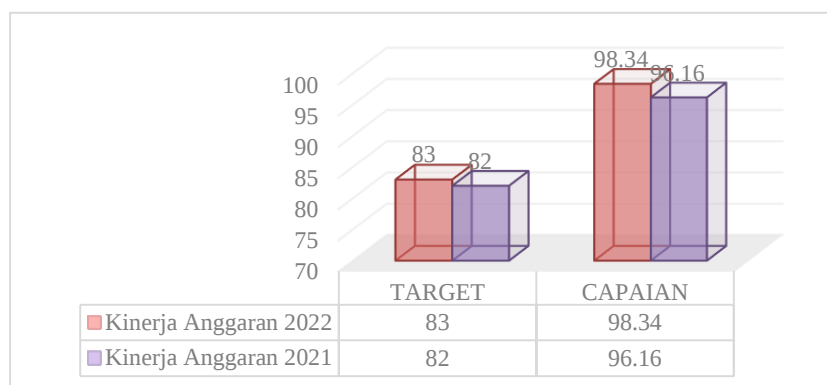
IKK 1.2: Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)



IKK 2.1: Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau

Satuan	2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Predikat	BB	A	A	A

IKK 2.2: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau



Realisasi anggaran pada tahun 2022 mencapai angka 99,29% dengan total dana yang terserap sejumlah Rp 20.819.763.403,00.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. kualitas sumber daya baik SDM maupun sarana prasarana di jenjang PAUD dan Dikmas yang masih belum memadai; dan
2. kondisi geografis beberapa kabupaten di Provinsi Riau yang memerlukan usaha lebih untuk menjangkaunya.

Tindak lanjut dan langkah antisipasi yang dilakukan yaitu:

- a. mendorong untuk segera dilakukan mutasi/perekrutan SDM di bidang PAUD Dikmas;
- b. menyesuaikan lama waktu penugasan untuk daerah dengan geografis yang sulit; dan
- c. meningkatkan kolaborasi dan kemitraan lintas UPT Kemendikbudristek dan Mitra Pembangunan dalam pencapaian kesuksesan Program Prioritas Kemendikbudristek di Provinsi Riau.

Pada tahun 2022, BPMP Provinsi Riau memperoleh predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kemendikbudristek.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	4
BAB II Perencanaan Kinerja.....	5
A. Visi dan Misi BPMP Provinsi Riau.....	5
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah	6
BAB III Akuntabilitas Kinerja	9
A. Capaian Kinerja.....	9
B. Realisasi Anggaran.....	6
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	6
BAB IV Penutup	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja LPMP Provinsi Riau 2020 – 2021	6
Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja BPMP Provinsi Riau 2022 – 2024	6
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja 2022	7
Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	7
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022	7
Tabel 3.1. Capaian kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2022	9
Tabel 3.2. Capaian IKK ersentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran Tahun 2022	10
Tabel 3.3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan indikator kinerja	12
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dengan Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya Beserta Penjelasan Indikator Kinerja	13
Tabel 3.5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan indikator kinerja	13
Tabel 3.6. Target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan indikator kinerja	20
Tabel 3.7. Realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan indikator kinerja	20
Tabel 3.8. Realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra beserta penjelasan indikator kinerja.....	21
Tabel 3.9. Indikator capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022.....	27
Tabel 3.10. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2022.....	28
Tabel 3.11. Realisasi belanja pada tahun 2021 dan 2022	29
Tabel 3.12 Perbandingan capaian realisasi belanja pegawai terhadap pagu TA. 2021 dan 2022.....	29
Tabel 3.13. Perbandingan capaian realisasi belanja barang terhadap pagu TA. 2021 dan 2022.....	30
Tabel 3.14. Perbandingan capaian realisasi belanja modal terhadap pagu TA. 2021 dan 20221	31
Tabel 3.15. Perbandingan efesiensi anggaran pada program fasilitasi dan pembinaan lembaga tahun 2022 dan 2021	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Capaian persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.....	10
Grafik 3.2. Satuan pendidikan pelaksana asesmen nasional tahun 2022 Provinsi Riau	14
Grafik 3.3. Satuan pendidikan pelaksana asesmen nasional tahun 2022 tingkat kabupaten/kota	14
Grafik 3.4. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	25
Grafik 3.5. Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran	25
Grafik 3.6 Nilai evaluasi kinerja anggaran	26
Grafik 3.7. Perbandingan capaian nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) tahun anggaran 2022 dan 2021	27
Grafik 3.8. Capaian kinerja dan capaian anggaran BPMP Provinsi Riau tahun 2022.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Keadaan PNS BPMP Provinsi Riau Tahun 2022	22
Gambar 3.2. Keadaan PPNNP BPMP Provinsi Riau Tahun 2022	22
Gambar 3.3. Tampilan halaman depan aplikasi SITUAH	32
Gambar 3.4. Tampilan submenu pembiayaan dalam aplikasi SITUAH.....	32
Gambar 3.5. Tampilan submenu kuitansi pada aplikasi SITUAH.....	33
Gambar 3.6. Tampilan submenu dokumen keuangan pada aplikasi SITUAH.....	33
Gambar 3.7. Tampilan submenu pengajuan tunjangan kinerja pada aplikasi SITUAH.....	34
Gambar 3.8. tampilan submenu peminjaman dokumen keuangan pada aplikasi SITUAH....	34
Gambar 3.9. Piagam Penghargaan predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kemendikbudristek	35

BAB I

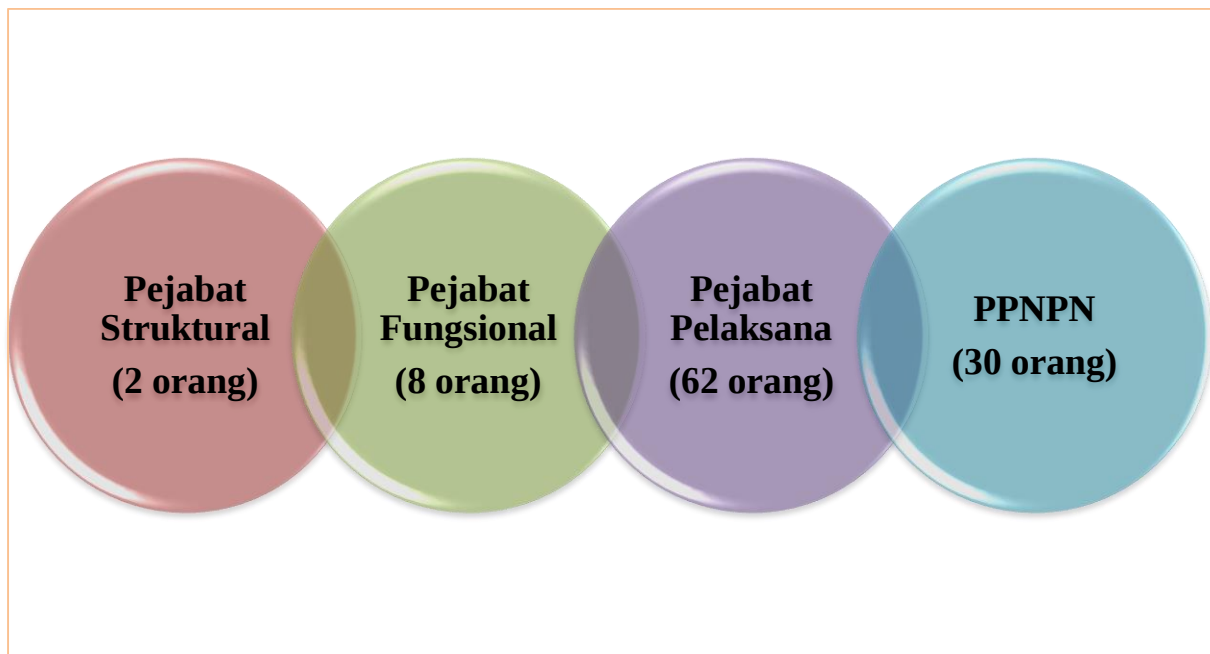
Pendahuluan

A. Gambaran Umum

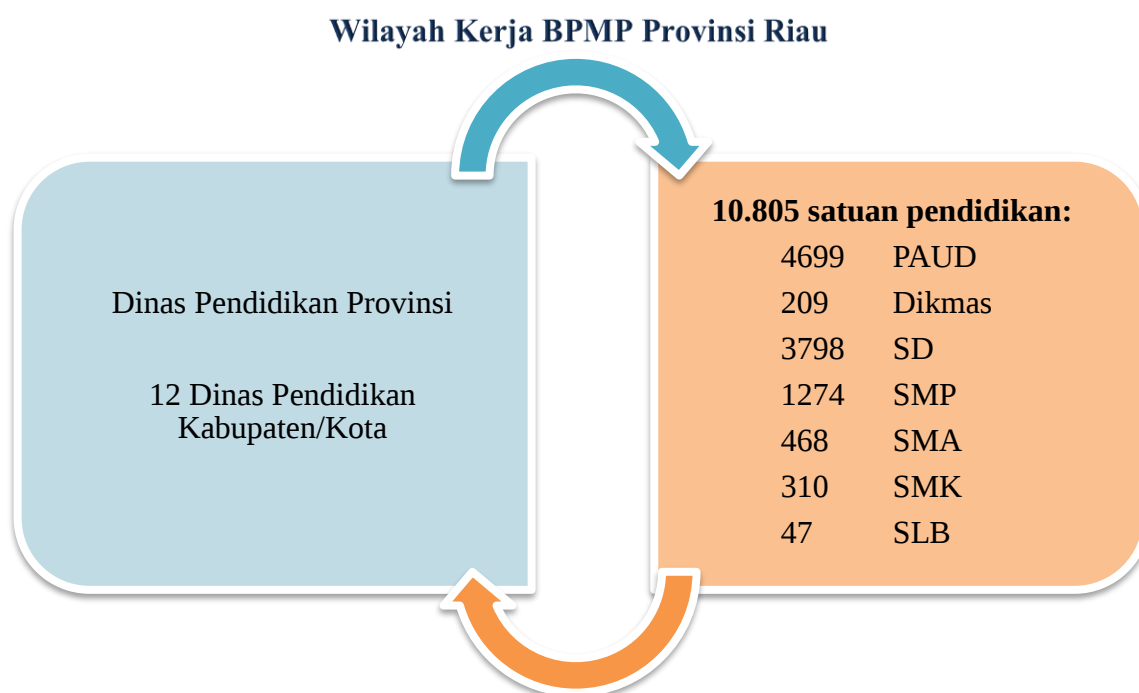
BPMP Provinsi Riau merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan BPMP, bahwa untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu dilakukan pengintegrasian unit pelaksana teknis yang menangani fungsi penjaminan mutu pendidikan pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

BPMP Provinsi Riau dipimpin oleh Dr. Wisma Endrimon, M.Pd dengan jumlah pegawai sebanyak 72 orang PNS dan 30 orang PPNP.

Gambar 1.1. Gambaran SDM BPMP Provinsi Riau



Gambar 1.2. Wilayah Kerja BPMP Provinsi Riau



B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan BPMP;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan BPMP;

9. Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 – 2024;
10. Rencana Strategis BPMP Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024;
11. Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2022.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Gambar 1.3. Tugas dan fungsi BPMP Provinsi Riau



Tugas

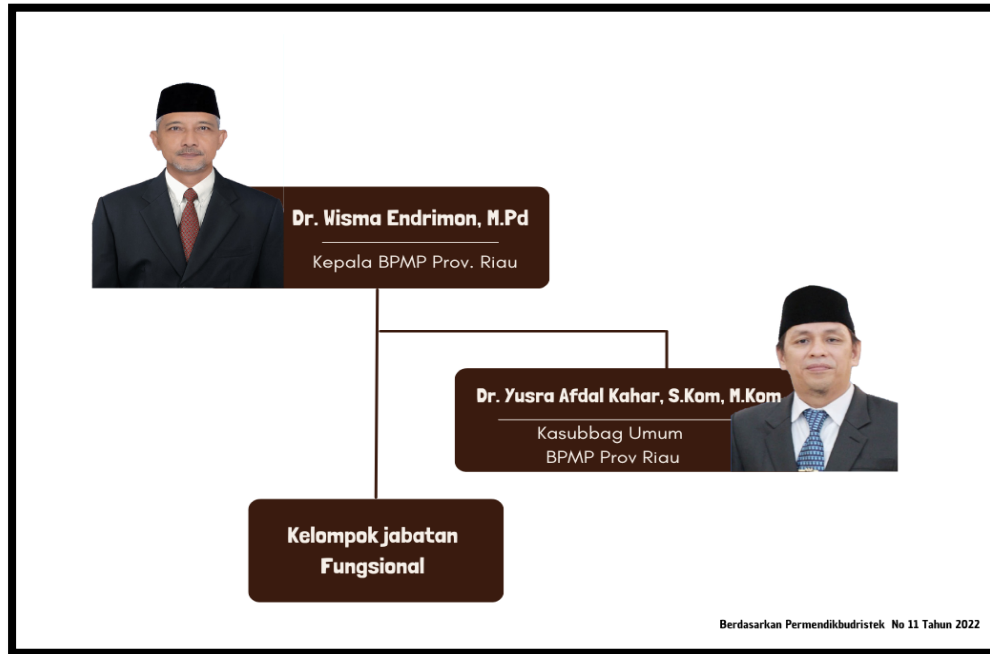
melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Fungsi

- pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- pelaksanaan urusan administrasi.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, BPMP Provinsi Riau memiliki struktur organisasi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022. Berikut struktur organisasi BPMP Provinsi Riau :

Gambar 1.4 Struktur organisasi BPMP Provinsi Riau



D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Isu Strategis

- Masih terdapat satuan pendidikan yang belum melaksanakan Asesmen Nasional
- Komitmen pemangku kepentingan belum maksimal dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak
- Masih terdapat satuan pendidikan yang belum memanfaatkan profil pendidikan untuk Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Peran Strategis

- Penguatan manajemen dan tata kelola lembaga melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
- Mengembangkan kompetensi pegawai sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan tuisi
- Meningkatkan kemitraan dengan Pemda dan mitra lainnya dalam hal kebijakan dan penganggaran untuk penjaminan mutu pendidikan

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi BPMP Provinsi Riau

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Riau menetapkan visi berdasarkan pada visi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045 dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan. Adapun visi dan misi BPMP Provinsi Riau 2020-2024 adalah:

Gambar 2.2. Visi dan misi BPMP Provinsi Riau



B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan, BPMP Provinsi Riau menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun anggaran (2020 – 2024) terdiri dari sasaran, indikator, dan target LPMP Provinsi Riau pada tahun 2020 dan 2021 serta

sasaran, indikator, dan target BPMP Provinsi Riau pada tahun 2022 – 2024. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja LPMP Provinsi Riau 2020 – 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	
			2020	2021
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan			
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,5	27,4
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	5
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95	95,2
SK 2	Meningkatnya Tata Kelola LPMP Provinsi Riau			
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Riau	Predikat	BB	BB
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L LPMP Provinsi Riau	Nilai	81	82

LPMP Provinsi Riau memiliki 2 Sasaran Kegiatan dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan. Setelah restrukturisasi lembaga menjadi BPMP Provinsi Riau berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022, terdapat perubahan sasaran dan indikator menjadi 2 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja BPMP Provinsi Riau 2022 – 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0.98	1.96	3.92
IKK 1.2	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen	%	25	30	35
SK 2	Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Riau				
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	Predikat	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau	Nilai	83	84	85

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Riau merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2.	[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau	83

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.669.146.000
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 15.788.764.000
	TOTAL	Rp. 19.457.910.000

Kemudian dari perjanjian kinerja tersebut, terjadi tiga kali revisi berupa penambahan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk kegiatan Program Sekolah Penggerak, yang merupakan bagian dari kode kegiatan 6397 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas.

Perubahan alokasi anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 5.179.202.000
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 15.788.764.000
	TOTAL	Rp. 20.967.966.000

Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, BPMP Provinsi Riau menetapkan program prioritas untuk tahun anggaran 2022, antara lain:

1. implementasi pembelajaran paradigma baru;
2. pendampingan asesmen nasional;
3. program sekolah penggerak;
4. pemanfaatan platform rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data;
5. transformasi digitalisasi sekolah (sumber daya sekolah);
6. pengelolaan Kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, BPMP Provinsi Riau menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian kinerja BPMP Provinsi Riau Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	100	400
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	3.17	323.47
Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	A	A	100
Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau	83	98.34	118.48

A. Sasaran Kegiatan 1 (Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen)

1. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah Provinsi Riau yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil akreditasi.

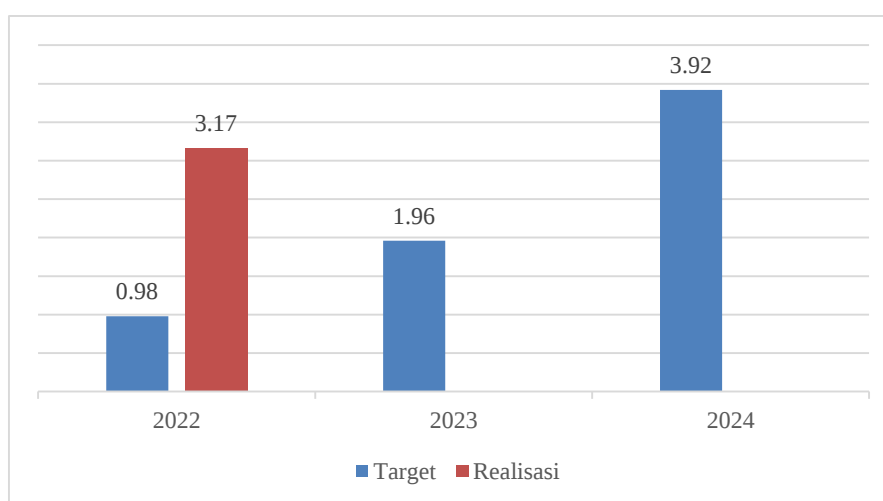
Tabel 3.2. Capaian IKK ersentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Capaian				Target Renstra 2024	% Capaian Renstra 2024
				2021	2022	Selisih	%		
1.1.	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0.98	13.10	16.27	3.17	323.47	3.92	81

Sumber : Data Akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember) 2022

Dari target 0.98%, tercapai 3.17% sehingga ketercapaian target IKK ini sebesar 323.47%. Penilaian berdasarkan persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2021 ke TA 2022 yang dilihat dari nilai akreditasi. Pada tahun 2021 kenaikan mutu pembelajaran adalah 13.10% dan pada tahun 2022 kenaikannya mencapai 16.27%. Pada tahun 2022 jumlah satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) di Provinsi Riau yang terakreditasi sebanyak 2,703 satuan pendidikan. Capaian peningkatan mutu pembelajaran (PAUD Dikmas) tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 3.17% dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 2,253 satuan pendidikan. Capaian ini telah memenuhi 81% dari target IKK di tahun 2024.

Grafik 3.1. Capaian persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya



Untuk mencapai target kinerja IKK 1.1. ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yaitu:

- a. implementasi kurikulum merdeka dengan mitra pembangunan dan BGP Provinsi Riau;
- b. koordinasi pelaksanaan merdeka belajar di kabupaten/kota Provinsi Riau;
- c. pelaksanaan pendampingan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan satuan pendidikan program sekolah penggerak angkatan 2;
- d. pendampingan pemanfaatan platform rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data bagi pengawas sekolah jenjang PAUD dan admin BOP Salur dinas pendidikan kabupaten/kota;
- e. pendampingan implementasi DAK bidang pendidikan;
- f. bimtek program sekolah penggerak ke Pemda.

Rincian program dan kegiatan terlampir.

Strategi mencapai target kinerja IKK 1.1. ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yaitu:

- a. secara periodik melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota untuk melakukan kegiatan, baik secara daring maupun luring. Koordinasi secara daring dilakukan melalui kegiatan PMO, dan koordinasi secara luring dilakukan melalui kunjungan ke daerah;
- b. secara periodik melakukan koordinasi dengan Mitra Pembangunan dalam hal ini Tanoto Foundation yang sudah bekerjasama dengan 5 Kab/Kota di Provinsi Riau;
- c. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan UPT Kemendikbudristek lainnya di Provinsi Riau;
- d. memperbarui dan memantau pergerakan data di berbagai aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek.

Kendala dan hambatan mencapai target kinerja IKK 1.1. ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yaitu diantaranya:

- a. belum ada SDM di bidang PAUD Dikmas dikarenakan adanya restrukturisasi lembaga di Kemendikbudristek;
- b. kualitas sumber daya baik SDM maupun sarana prasarana di jenjang PAUD dan Dikmas masih belum memadai;
- c. kondisi geografis beberapa kabupaten di Provinsi Riau yang memerlukan usaha lebih untuk menjangkaunya;
- d. terbatasnya kuota satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas yang bisa dilayani dan didampingi dalam peningkatan mutunya.

Tindak lanjut dan langkah antisipasi :

- d. mendorong untuk segera dilakukan mutasi/perekrutan SDM di bidang PAUD Dikmas;
- e. melakukan koordinasi dan advokasi dengan Kab/Kota agar memberikan perhatian lebih dalam menganggarkan dana peningkatan mutu SDM dan sarana prasarana PAUD Dikmas;
- f. menyesuaikan lama waktu penugasan untuk daerah dengan geografis yang sulit.
- g. melakukan pemerataan kuota satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas yang akan dilayani.

2. Indikator Kegiatan 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

- a. Penjelasan singkat definisi operasional Indikator Kinerja

Persentase dari Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya

- b. Cara perhitungan Indikator Kinerja

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- c. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan indikator kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2022	Realisasi/ Capaian 2022
1.2.	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25,00	400

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dengan Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya Beserta Penjelasan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Realisasi/ Capaian		selisih	% Capaian
			2021	2022		
1.2.	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen	%	0	400	400	400

- e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan indikator kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan		Tahun 2022			Target Renstra 2024	% Capaian Renstra 2024
		Target	Realisasi	% Capaian		
1.2.	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen	25	100	400	35	400

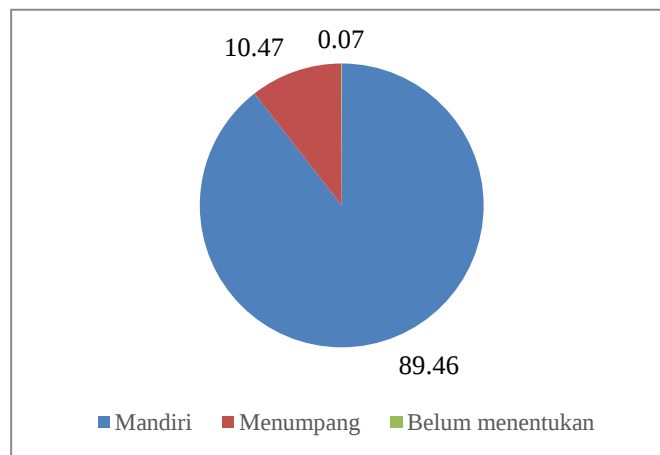
- f. Analisis program dan kegiatan, yang mendukung realisasi target kinerja Indikator Kinerja

Pengukuran IKK 1.2 terkait erat dengan upaya memfasilitasi satuan pendidikan untuk meningkatkan kinerjanya, pelaksanaan AN dan PSP, Data Mutu Pendidikan yang terbaru dan valid, serta kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disosialisasikan dengan baik dan diterima dengan optimal oleh seluruh stakeholder pendidikan di Provinsi Riau. Adapun kegiatan pendukung yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

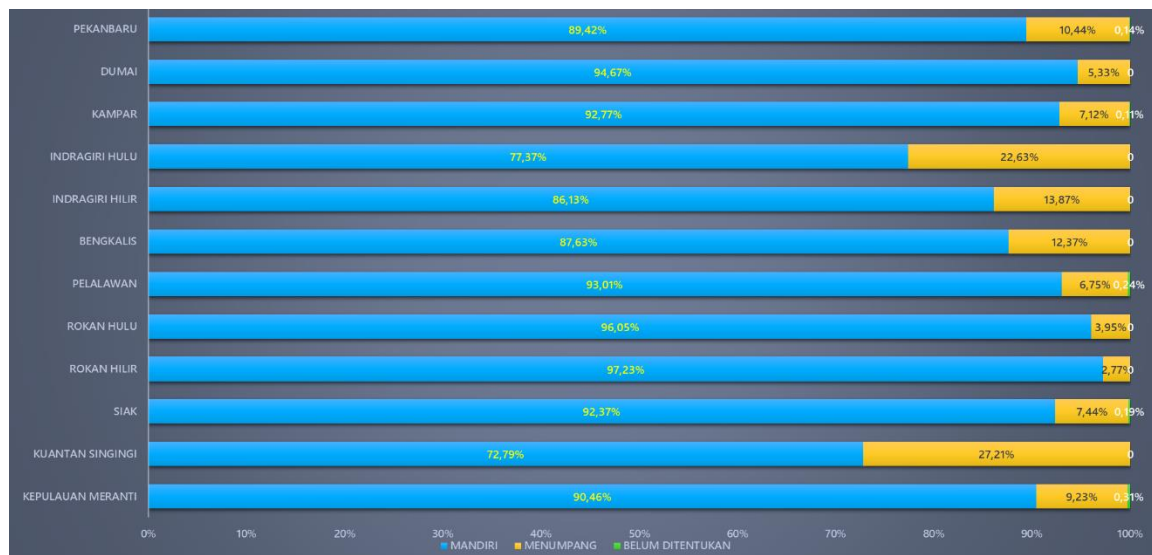
1. Pendampingan Kebijakan Kemdikbudristek terkait pelaksanaan asesmen nasional

Asesmen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 99,93% dengan rincian 89,47 melaksanakan secara mandiri, 10,47 secara menumpang dan masih terdapat 0,07% yang masih belum menentukan.

Grafik 3.2. Satuan pendidikan pelaksana asesmen nasional tahun 2022 Provinsi Riau



Grafik 3.3. Satuan pendidikan pelaksana asesmen nasional tahun 2022 tingkat kabupaten/kota



Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja

- penetapan status pelaksanaan masih bisa berubah sampai dengan pelaksanaan AN utama jadi data yang dikumpulkan masih bergerak;
- instrumen yang dibuat belum menjangkau informasi permasalahan dalam persiapan ANBK secara rinci;
- minimnya anggaran untuk ANBK sehingga hanya bisa melakukan Simulasi, Gladi dan Monev di jenjang sekolah dasar;
- posko ANBK tingkat Kabupaten banyak yang tidak berjalan sesuai dengan POS ANBK;
- banyak ajuan permasalahan di web ANBK yang tidak ditanggapi;
- masih banyak satuan pendidikan yang kesulitan dalam akses internet dan jarak sekolah yang akan ditumpangi jauh.

Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja :

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota lebih awal dalam persiapan pelaksanaan asesmen nasional, penetapan status pelaksanaan asesmen, penentuan distribusi sekolah menumpang dan pelaksanaan simulasi, gladi bersih dan pelaksanaan asesmen utama;
 - b. pembuatan instrumen melibatkan seluruh pegawai yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pembuatan instrumen;
 - c. menganggarkan secara tepat sehingga dapat melaksanakan kegiatan ANBK di semua jenjang;
 - d. advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendata sekolah yang mengalami kesulitan akses internet untuk segera dapat dicarikan sekolah menumpang.
- Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Keterlaksanaan asesmen nasional tidak lepas dari peran dari dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan pelaksana asesmen nasional sehingga sangat diperlukan:

- a. pembentukan tim teknis tingkat Kabupaten/Kota;
- b. mengoptimalkan kinerja Posko AN tingkat Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan sumberdaya yang memadai di tingkat satuan pendidikan.

2. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan

Verifikasi dan validasi data mutu pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan ketersediaan data pendidikan yang valid, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai basis.

Dapodik adalah salah satu sistem pendataan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang disebut sebagai entitas data, dan terus menerus diperbaharui secara daring. Hasil pengumpulan data melalui Dapodik menjadi dasar diterbitkannya data statistik pendidikan yang memberikan akses informasi kepada para pemangku kepentingan

Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

- a. dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi formulir, prosedur dan aplikasi Dapodik Narasumber pusat (admin Dapodik Pusat) hanya berkesempatan hadir secara virtual, sehingga diskusi dan penyampaian materi kurang optimal;
- b. masih kurangnya kepedulian Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pemetaan dan penataan satuan pendidikan yang tidak beroperasi/non aktif. Sehingga mempengaruhi persentase pengiriman data Dapodik melalui web Dapodikdasmen;

- c. data yang diterima dari sekolah terkait data Dapodik sebagian besar tidak lengkap sehingga hasil entri petugas pelaksana kegiatan tidak lengkap dan terlambat diselesaikan.

Analisis terkait Langkah antisipasi dan strategi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja :

- a. kelompok kerja (Pokja) DP2M melakukan koordinasi dengan Admin Dapodik Pusat dan melakukan studi tiru dengan Pokja DP2M antar BPMP;
- b. BPMP Provinsi Riau mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota untuk segera mengajukan penonaktifan sementara satuan pendidikan tidak aktif/tidak beroperasi;
- c. membangun komunikasi secara virtual melalui WAG (*Whatsapp Group*) admin Dapodik se Provinsi Riau;
- d. melakukan koordinasi dengan sekolah terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan menekankan pentingnya kelengkapan dokumen untuk mendapatkan data Dapodik yang valid, sehingga keberadaan dokumen pendukung sangat penting.

3. Pendampingan Kebijakan Kemendikbudristek Terkait Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Program sekolah penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui lima intervensi. Salah satu intervensi ini adalah pendampingan ke pemerintah daerah, pendampingan ini dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun dan diharapkan sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju.

Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:

- a. peserta kegiatan yang hadir tidak sesuai dengan target/kuota karena banyak diantaranya yang tidak memenuhi kriteria pendaftaran;
- b. lokasi sasaran peserta kegiatan yang terlalu jauh dari tempat pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa calon peserta yang tidak hadir;
- c. terdapat sekolah penggerak angkatan 2 yang lokasinya sulit diakses sehingga pendampingan menjadi kendala, selain itu tidak semua kepala satuan pendidikan berada di sekolah;
- d. terdapat peserta yang tidak memiliki kompetensi teknologi informasi yang mumpuni sehingga kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. terdapat peserta yang berasal dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dinilai tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan, padahal kegiatan FPK dilaksanakan untuk mensinergikan seluruh pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan capaian, kendala, maupun tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan selama penyelenggaraan program sekolah penggerak;
- f. keterlambatan kehadiran dari sejumlah peserta dikarenakan koordinasi internal lembaga yang diundang yang tidak berjalan dengan optimal;

- g. peserta yang berasal dari unsur pengawas banyak yang tidak hadir akibat mengikuti kegiatan dari Pusat pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Forum Pemangku Kepentingan (FPK) Akt 1 tahun 2022;
- h. bentuk kegiatan yang diharapkan oleh peserta lebih menekankan pada aksi.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja :

- a. koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait penugasan calon peserta kegiatan yang diharapkan sesuai dengan target dan sasaran kegiatan;
- b. koordinasi berkelanjutan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau dalam mengkomunikasikan strategi penyelenggaraan program sekolah penggerak;
- c. evaluasi materi kegiatan disampaikan kepada narasumber dan menyusun perancangan kegiatan berikutnya yang lebih menekankan pada aksi.

4. Implementasi Pembelajaran Paradigma Baru

Pembelajaran Paradigma Baru atau Kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan Dimensi Profil Pelajar Pancasila.

Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan disekolah benar-benar berpusat pada siswa (*Student Centered Learning*), yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja diantaranya:

Kegiatan Implementasi Pedoman Pembelajaran Paradigma Baru di 12 Kabupaten/Kota merupakan kolaborasi antara BPMP Provinsi Riau dengan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau. Terkait dengan mekanisme penetapan peserta dan undangan kegiatan ditangani oleh BGP Provinsi Riau. Dengan demikian, pihak penyelenggara dari BPMP Provinsi Riau tidak memiliki wewenang dalam mengontrol kehadiran peserta maupun BPMP Provinsi Riau tindak lanjut terhadap ketidakhadiran peserta.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja adalah:

Pihak penyelenggara dari BPMP Provinsi Riau mengkomunikasikan kendala terkait ketidakhadiran peserta dari sejumlah daerah ke BGP Provinsi Riau.

5. Pendampingan Kebijakan Kemendikbudristek Terkait Kompetensi Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi numerasi sebagai pengetahuan dan kecakapan yang erat kaitannya dengan pemahaman angka, simbol dan analisis informasi kuantitatif (grafik, tabel, bagan, dan sebagainya), sangat penting dimiliki generasi saat ini. Penguatan literasi numerasi peserta didik di sekolah dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berjenjang mulai dari tingkat pemerintah daerah, satuan pendidikan dan kelas. Literasi Numerasi juga dapat dipelajari melalui pembiasaan, terintegrasi dalam pembelajaran hingga pengembangan pada ekstrakurikuler.

Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:

- a. terdapat calon peserta kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi yang tidak hadir karena adanya miskomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akibat pelaksanaan 2 kegiatan dalam waktu yang bersamaan;
- b. kendala yang ditemui petugas ketika pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Implementasi Literasi dan Numerasi ke Pemerintah Daerah Prov. Riau adalah belum adanya pembentukan Tim Pendamping Literasi Daerah (TPLD) oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja:

- a. koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait penugasan calon peserta kegiatan yang diharapkan berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. mendorong Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk segera membentuk Tim Pendamping Literasi Daerah (TPLD) dengan memberikan contoh SK dari pemerintah daerah di luar Provinsi Riau.

6. Pelaksanaan Bahan Kemitraan berdasarkan profil pendidikan

Penyusunan Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan bertujuan untuk memberikan data terkait profil pendidikan. Pelaksanaan kemitraan berdasarkan profil pendidikan melibatkan Dinas Pendidikan Kab/kota dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi yang menangani profil pendidikan.

Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja adalah:

- a. peserta yang diutus untuk mengikuti kegiatan bukan pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan Kab/Kota, sehingga materi terkait kegiatan tidak maksimal tersampaikan padahal yang diharapkan adalah setelah mengikuti kegiatan, Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat mempertimbangkan untuk dimasukkan dalam

- kebijakan yang dikeluarkannya terkait Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan profil pendidikan;
- b. peserta yang hadir tidak mencapai 100%.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja diantaranya:

- a. hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Bahan Kemitraan dan Kerjasama Berdasarkan Profil Pendidikan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota sehingga materi yang diharapkan dapat dipahami oleh peserta kegiatan perwakilan Disdik akhirnya dapat tersosialisasikan dengan maksimal;
- b. penyebaran informasi ditekankan kepada peserta yang hadir untuk diberikan kepada rekan kerjanya yang tidak hadir di pelaksanaan kegiatan.

7. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pelaksanaan DAK bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait pelaksanaan DAK dan usulan penerima DAK.

Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja

1. terdapat pertanyaan di instrumen Pendampingan Implementasi DAK yang tidak sesuai dengan metode pengadaan yang dilaksanakan di lapangan;
2. hambatan dalam sosialisasi DAK adalah penentuan waktu pelaksanaan kegiatan karena dikarenakan narasumber yang mempunyai kompetensi dengan deskripsi kegiatan sangat terbatas.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja sebagai berikut:

1. sebelum instrumen diterbitkan akan dilakukan pengkajian lebih dalam untuk penyesuaian dengan kondisi di lapangan sehingga data yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan lebih valid
2. melakukan koordinasi dengan pusat untuk penentuan jadwal atau terdapat narasumber pengganti yang sesuai.

B. Sasaran Kegiatan 2 (Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Riau)

1. Indikator Kegiatan 2.1. Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau

- a. Penjelasan singkat definisi operasional indikator kinerja

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau diperoleh melalui akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam

Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

b. Cara perhitungan indikator kinerja

[Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

c. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja.

Tabel 3.6. Target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan indikator kinerja.

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Penjelasan
Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	Predikat	A	A	Tercapainya predikat A pada LAKIN BPMP Provinsi Riau Tahun 2022 berdasarkan lembar Hasil Evaluasi Instansi Pemerintah oleh Kemenpan RB

d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel 3.7. Realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan indikator kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		
		2020	2021	2022
Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	Predikat	80,06 (A) Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel	81,17 (A) Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel	84,00 (A) Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel

- e. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja.

Tabel 3.8. Realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra beserta penjelasan indikator kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		Penjelasan
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Predikat SAKIP BPMP Provinsi Riau	Predikat	BB	A	BB	A	A	A	Tercapainya predikat A pada LAKIN BPMP Provinsi Riau Tahun 2022 berdasarkan lembar Hasil Evaluasi Instansi Pemerintah oleh Kemenpan RB

- a. Analisis program dan kegiatan yang mendukung realisasi target indikator kinerja

Untuk mendukung realisasi target kinerja IKK, maka BPMP Riau melakukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di 4 Pokja, kelompok jabatan fungsional dan kelompok ketatausahaan. Rincian program dan kegiatan terlampir.

b. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja

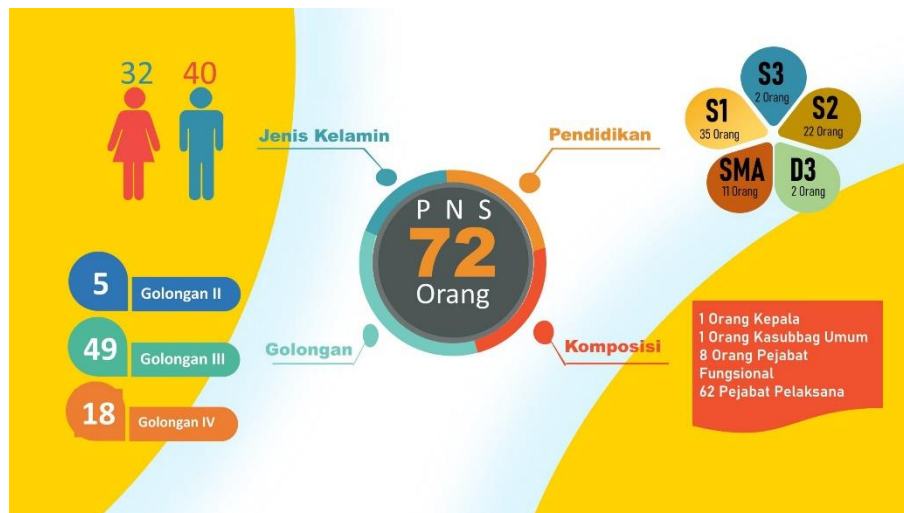
Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian target dari indikator BPMP Provinsi Riau adalah :

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

1) PNS

Gambar 3.1. Keadaan PNS BPMP Provinsi Riau Tahun 2022



Disamping Pendidikan formal yang sudah dimiliki oleh pegawai mereka juga dilatih dalam berbagai kegiatan untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya sehingga dapat mendukung penyelesaian setiap target kerja yang diberikan kepada instansi.

2) Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Gambar 3.2. Keadaan PPNPN BPMP Provinsi Riau Tahun 2022



Tenaga PPNN yang membantu kebersihan, pengemudi, dan keamanan instansi dengan jumlah 30 orang, ini sangat membantu dalam mendukung keberhasilan target instansi dalam pencapaian indikator tatakelola.

b. Konsultan Pendamping Penjaminan Mutu

BPMP Provinsi Riau memiliki konsultan pendamping penjaminan mutu sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Kemendikbudristek.

c. Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap SDM memahami dan mengetahui tugas serta tanggung jawab masing-masing sehingga dalam menyelesaikan suatu tugas dan kegiatan yang dipercayakan kepada mereka dapat dikerjakan sesuai dengan kewenangannya dan saling bekerjasama dalam setiap Pokja.

d. Hubungan Kerja

Kerjasama antar setiap karyawan terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta kolaborasi dalam penyelesaian pekerjaan yang diberikan kepada instansi.

e. Sarana dan Prasarana

Dalam pencapaian target indikator kinerja Instansi maka BPMP Provinsi Riau melengkapi semua kebutuhan yang harus ada untuk menyelesaikan setiap kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

f. Komitmen Pegawai dan Pimpinan

Adanya komitmen semua ekosistem di instansi yang bersama-sama akan melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan target per triwulan sesuai dengan kewenangannya dan mengedepankan kerjasama.

g. Keterlibatan Pimpinan

Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan selalu terlibat dalam pengawasan dan evaluasi.

h. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan semua indikator kinerja instansi terdapat pengawasan dari pimpinan dan tim SPI serta dilakukan evaluasi agar target kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

2. Faktor Eksternal

- a. kerjasama yang baik dengan semua *stakeholder* yang terkait dengan pendidikan;
- b. kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian suatu kegiatan;
- c. komunikasi yang efektif dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan kerjasama kegiatan.

Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja.

Hambatan dalam pencapaian kinerja tata kelola lembaga diantaranya:

1. rencana kegiatan tidak tergambar secara jelas diawal tahun anggaran sehingga pelaksana kegiatan menafsirkan sendiri tujuan, bentuk, teknis dan sasaran kegiatan;
2. TOR yang diberikan oleh bagian perencanaan kepada pelaksana kegiatan belum sempurna sehingga membutuhkan telaah dan analisis;
3. nilai EKA yang masih rendah jika dibandingkan dengan nilai IKPA.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi target kinerja.

Langkah yang dilakukan untuk antisipasi hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. melakukan identifikasi dan telaah awal terhadap program dan kegiatan dimasing-masing pelaksana kegiatan (Pokja, Jafung dan Ketatausahaan) untuk menentukan tujuan, bentuk, teknis dan sasaran kegiatan;
2. membuat perencanaan untuk pencapaian target kinerja instansi berdasarkan kegiatan yang sudah diberikan oleh Kementerian kepada BPMP Provinsi Riau dengan membuat jadwal realisasi ketercapaian kinerja untuk setiap triwulan;
3. membuat manajemen resiko agar pencapaian target kinerja dapat terlaksana sesuai rencana secara efektif dan efisien di awal tahun;
4. meningkatkan kompetensi tim untuk pelaksana kegiatan agar pelaksanaan program dapat dilaksanakan secara professional;
5. meningkatkan kolaborasi dan kemitraan lintas UPT Kemendikbudristek dan Mitra Pembangunan dalam pencapaian kesuksesan Program Prioritas Kemendikbudristek di Provinsi Riau.

Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah :

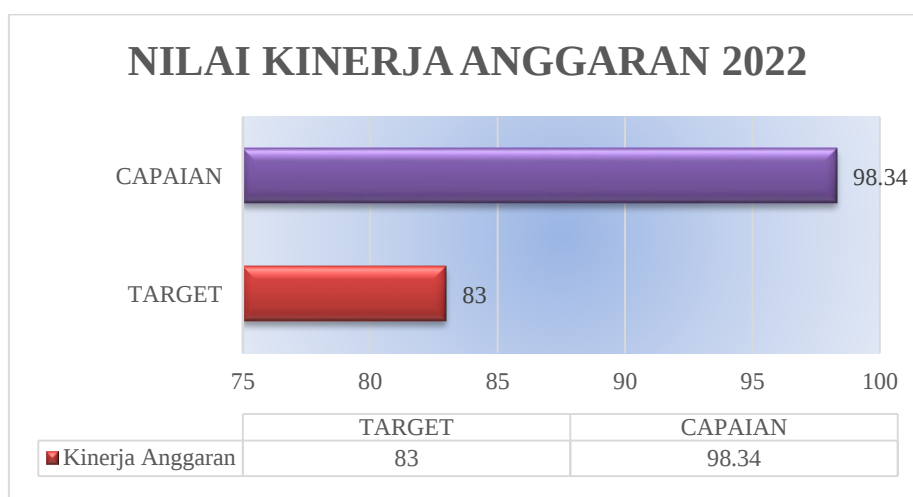
1. melakukan koordinasi dengan *stakeholder* untuk mendukung pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi mingguan yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek untuk memantau pencapaian dan mendapatkan informasi terkini;
3. melakukan evaluasi internal mengenai capaian kinerja instansi secara berkala.

2. Indikator Kegiatan 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Riau

a. Penjelasan singkat definisi operasional indikator kinerja

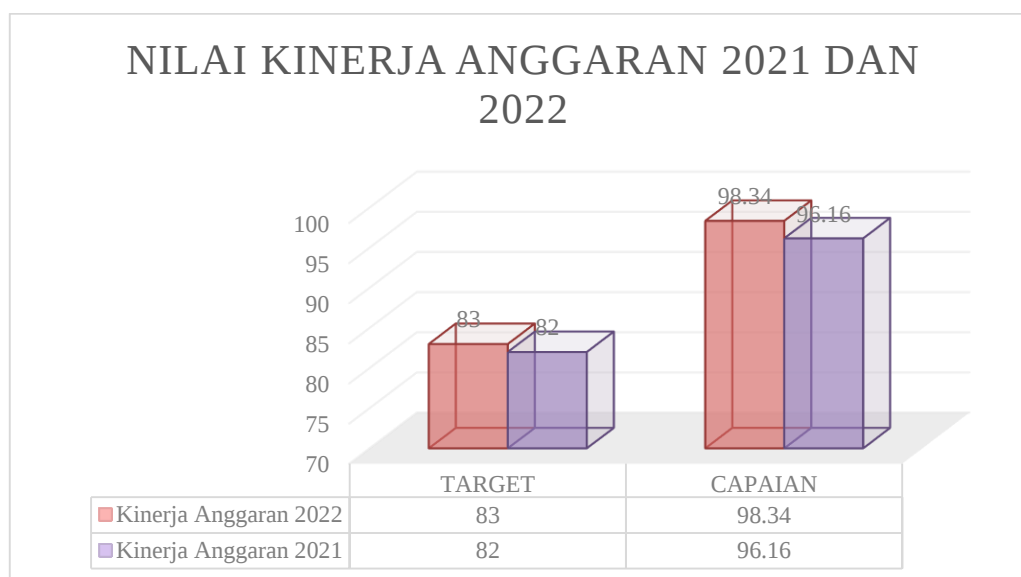
Menurut Perjanjian Kinerja Kepala pada IKK 2.2 yaitu tentang Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA/KL, pada pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 ini BPMP Provinsi Riau telah meraih nilai yang **jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan** yaitu dari target sebesar 83 dengan nilai capaian 98,34.

Grafik 3.4. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L



b. Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran dengan tahun anggaran sebelumnya ditampilkan pada grafik berikut:

Grafik 3.5. Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran



Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran. Nilai Kinerja Anggaran berasal dari 2 komponen berikut:

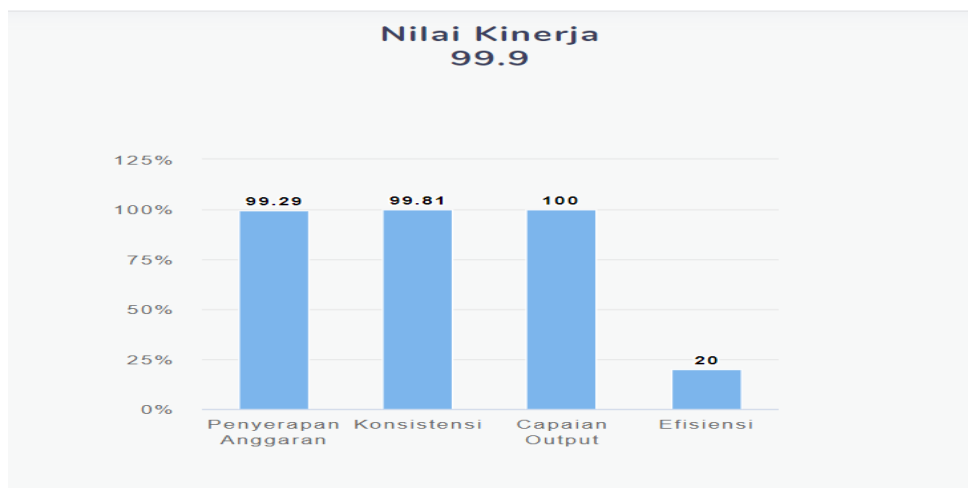
1. Nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dengan bobot sebesar 60%

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja Anggaran. Untuk tahun 2022 BPMP Provinsi Riau mencapai nilai Evaluasi Kinerja Anggaran sebesar 99,9.

Nilai evaluasi kinerja Anggaran bersumber dari :

- penyerapan anggaran, dengan capaian nilai 99,29;
- konsistensi, dengan capaian nilai 99,81;
- capaian output, dengan capaian nilai 100;
- efisiensi, dengan capaian nilai 20;

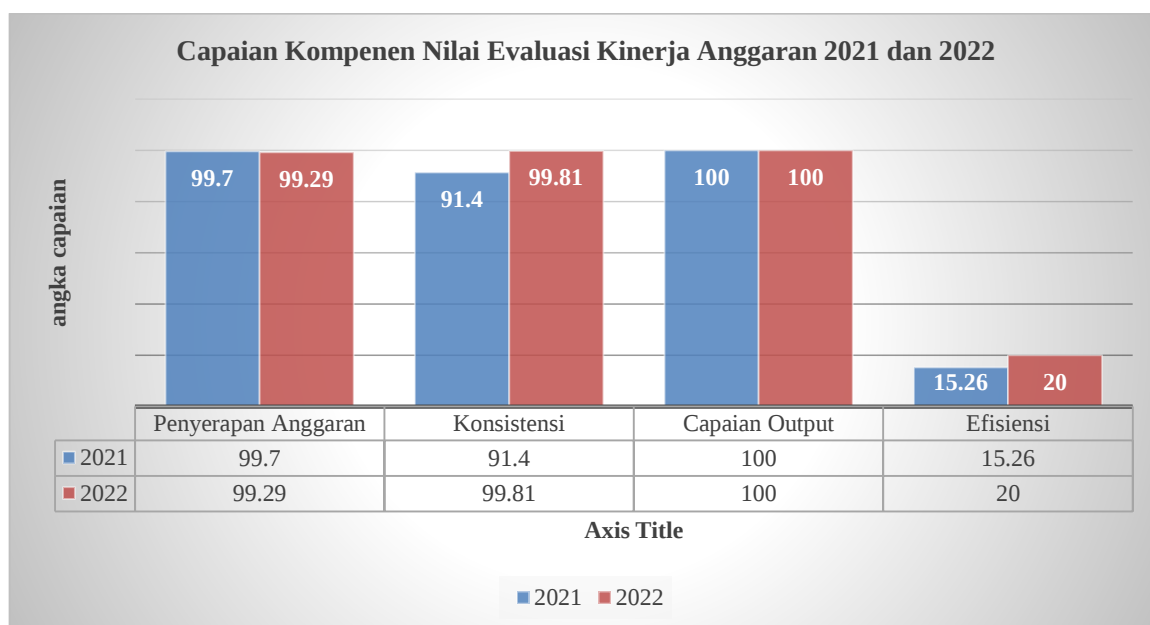
Grafik 3.6. Nilai evaluasi kinerja anggaran



sumber : spasikita.kemdikbud.go.id

Perbandingan capaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) tahun anggaran 2022 dan 2021 disampaikan pada grafik berikut:

Grafik 3.7. Perbandingan capaian nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) tahun anggaran 2022 dan 2021



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot sebesar 40%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/Lembaga. Untuk tahun 2022 BPMP Provinsi Riau meraih nilai IKPA sebesar 95,99, yaitu dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 3.9. Indikator capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022

No	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	73,50	10	7,35
3	Penyerapan Anggaran	93,46	20	18,69
4	Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,45	10	9,95
7	Dispensasi SPM	100,00	5	5,00
8	Capaian Output	100,00	25	25,00
	TOTAL		100	95,99
	Nilai Akhir	95,99		

sumber: spanint.kemenkeu.go.id

Deviasi Halaman III DIPA bernilai 7,35 dari bobot 10 dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan rencana pencairan dana sehingga harus dilakukan revisi pada halaman III DIPA.

Strategi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Riau dalam peningkatan nilai kinerja anggaran adalah:

- a. melakukan optimalisasi anggaran, yaitu melaksanakan program utama dengan menggunakan anggaran secara maksimal kemudian melakukan penyesuaian anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung program tersebut;
- b. melaksanakan semua prosedur penilaian EKA dan IKPA sesuai dengan ketentuan penilaian, semua indikator dilaksanakan dengan maksimal agar nilai yang didapat maksimal;
- c. perencanaan penarikan dana disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah disusun sehingga dapat mengurangi tingkat deviasi halaman III DIPA.

Hambatan dalam capaian nilai kinerja anggaran adalah:

Pelaksanaan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal yang direncanakan pada rapat kerja awal tahun anggaran karena adanya beberapa kebijakan khusus terkait kegiatan tersebut.

Solusi dari hambatan dalam capaian nilai kinerja anggaran adalah:

Mengoptimalkan koordinasi secara internal antar Pokja dan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan.

B. Realisasi Anggaran

Pada 1 Januari 2022 BPMP Provinsi Riau memiliki anggaran sebesar Rp19.457.910.000,00. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 anggaran naik menjadi Rp21.428.530.000,00. Namun oleh karena adanya refocusing kemudian turun menjadi Rp20.967.966.000,00. Hingga akhir tahun 2022 realisasi anggaran BPMP Provinsi Riau adalah sebesar Rp20.819.763.403,00 atau mencapai 99,29% dari alokasi anggaran sebesar Rp20.967.966.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2022

Uraian	31 Desember 2022		% Real. Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	9,773,442,000	9,743,828,625	99.70%
Belanja Barang	11,144,524,000	11,025,934,702	98.94%
Belanja Modal	50,000,000	49,999,200	100.00%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Realisasi Belanja Kotor	20,967,966,000	20,819,762,527	99.29%
Pengembalian Belanja	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	20,967,966,000	20,819,762,527	99.29%

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, Realisasi Belanja pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 0,41% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.11. Realisasi belanja pada tahun 2021 dan 2022

Uraian	TA 2022		%	TA 2021		%	Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	9.773.442.000	9.743.828.625	99,70	9.534.239.000	9.526.704.024	99,92	-0,22
Belanja Barang	11.144.524.000	11.025.934.702	98,94	10.801.924.000	10.747.531.955	99,50	-0,56
Belanja Modal	50.000.000	49.999.200	99,998	176.729.000	176.328.600	99,77	0,22
Jumlah	20.967.966.000	20.819.762.527	99,29	20.512.892.000	20.450.564.579	99,70	-0,41

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.743.829.501,00 dan Rp9.356.797.617,00. Realisasi Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp387.031.884,00,00 atau 4,14% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.12 Perbandingan capaian realisasi belanja pegawai terhadap pagu TA. 2021 dan 2022

Tahun 2021			Tahun 2022			Naik /Turun
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
9.534.239.000	9.526.704.024	99,921	9.773.442.000	9.743.828.625	99,697	-0,224%

2. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan

serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Realisasi belanja barang pada tahun anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.133.567.412,00 dan Rp10.747.328.600,00. Realisasi Belanja Barang pada tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp386.035.457,00 atau 3,59% dibandingkan realisasi belanja barang pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.13. Perbandingan capaian realisasi belanja barang terhadap pagu
TA. 2021 dan 2022

Tahun 2021			Tahun 2022			Naik /Turun
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
10.801.924.000	10.747.531.995	99,497	11.144.524.000	11.025.934.702	98,936	-0,561%

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49.999.200,00 dan Rp176.328.600,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp126.329.400,00 atau 71,64% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.14. Perbandingan capaian realisasi belanja modal terhadap pagu TA. 2021 dan 2022

Tahun 2021			Tahun 2022			Naik /Turun
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
176.729.000	176.328.600	99,773	50.000.000	49.999.200	99,998	0,225%

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022 BPMP Provinsi Riau berhasil melakukan efisiensi anggaran pada program Fasilitas dan Pembinaan Lembaga jika dibandingkan dengan tahun 2021. Data efisiensi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.15. Perbandingan efisiensi anggaran pada program fasilitas dan pembinaan lembaga tahun 2022 dan 2021

Kegiatan	2022			2021		
	Anggaran	Realisasi	Capaian Output	Anggaran	Realisasi	Capaian Output
Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	5.179.202.000	5.171.148.398	240 lembaga	4.401.904.000	4.363.857.344	167 lembaga
Rata-rata kebutuhan dana untuk 1 lembaga			21.546.452			26.130.882

Berdasarkan data diatas tahun 2022 untuk mencapai output 1 lembaga dibutuhkan anggaran rata-rata sekitar Rp21.546.452,00 sedangkan pada tahun 2021 rata-rata kebutuhan anggaran per lembaga Rp26.130.882,00. Efisiensi ini dapat dilaksanakan dengan optimalisasi biaya perjalanan dinas dan refocusing anggaran yaitu dengan memindahkan anggaran ke kegiatan yang lebih penting yang terkait dengan tugas dan fungsi utama BPMP Provinsi Riau.

Inovasi, Penghargaan, Dan Program *Crosscutting / Collaborative*

1. Inovasi

BPMP Provinsi Riau melakukan inovasi dengan mengembangkan aplikasi SITUAH dalam pengelolaan dan pengadministrasian dokumen keuangan sehingga menunjang program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digagas oleh pemerintah pusat.

Gambar 3.3. Tampilan halaman depan aplikasi SITUAH



Berikut fitur yang ada pada aplikasi SITUAH bagian Keuangan:

a. Pembiayaan

Pada submenu ini pengadministrasi keuangan dapat membuat usulan pembiayaan sesuai dengan surat tugas yang telah dikeluarkan pada user admin kepegawaian.

Gambar 3.4. Tampilan submenu pembiayaan dalam aplikasi SITUAH

ID	No	Nama Surat	Tanggal Surat	Uraian Kegiatan	Saat Tugas	Sampai Tugas
1	/		2023-01-25	membuat Perencanaan Perencanaan Taktik Perencanaan Baku	2023-01-25	2023-01-25
2	005CTA/Ku-SPO/2022		2023-01-29	Konsultasi dan Petakapan Capaian Didik Pali 2022 BPMP Provinsi Riau	2023-01-29	2023-01-29
3	005CTA/Ku-SPO/2022		2023-01-19	Pengukuran NPM Petakapan Pegawai BPMP Provinsi Riau	2023-01-19	2023-01-19
4	/		2023-01-05	Konsultasi UPT Tahun 2023	2023-01-05	2023-01-05
5	/		2023-01-05	mengambil DPA Tahun 2023	2023-01-05	2023-01-05
6	005CTA/Ku-SPO/2022		2023-01-02	melaikan Koordinasi Kalamangan	2023-01-04	2023-01-05

b. Kuitansi

Pada submenu ini membantu pengadministrasi keuangan untuk membuat kuitansi pembiayaan yang berasal dari Uang Persediaan

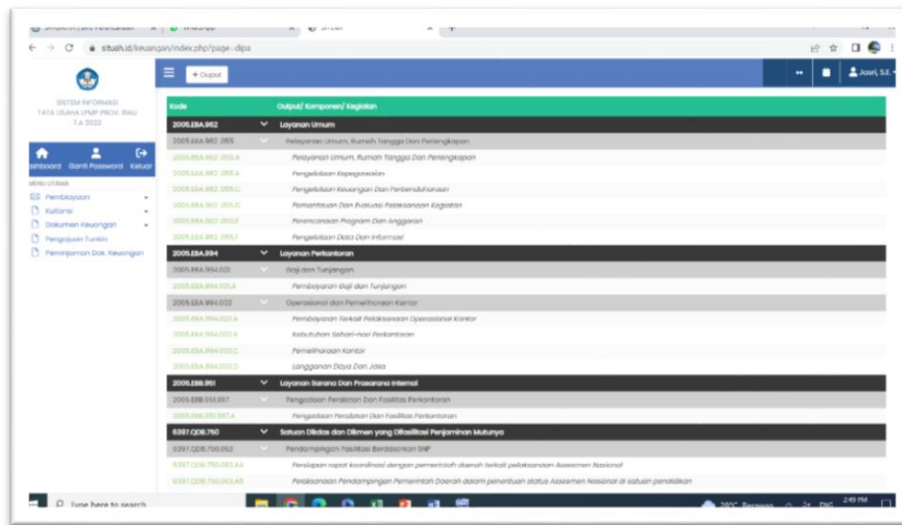
Gambar 3.5. Tampilan submenu kuitansi pada aplikasi SITUAH

No	Mula Anggaran	Tgl Lulus	Dikirim	Nama Perencanaan	Penawar	Uraian	Aksi	Tindakan
1	\$218	24 Jan 2023	6,315,445	Penerima	BPJS Petakapan	Biaya Kebutuhan Sahabat-ini Perencanaan Baku pembiayaan tahun 2023 Kalamangan BPMP Provinsi Riau Bulan Januari 2023		
2	\$218	23 Jan 2023	6,315,445	-	BPJS Petakapan	Biaya Kebutuhan Sahabat-ini Perencanaan Baku pembiayaan tahun 2023 Kalamangan BPMP Provinsi Riau Bulan Januari 2023		
3	\$219	01 Des 2022	7,403,700	DIKLA DIKPA	Atangiyah	Biaya Pembuatan Paket dan Program Diseminasi hasil Kalamangan tanggal 12-11 Desember 2022		
4	\$218	01 Jan 2023	1,000,000	P1. Pro Indonesia		Biaya Kebutuhan Perencanaan Baku Pembiayaan Material 10.000 sebanyak 100 lembar Kalamangan BPMP Provinsi Riau Bulan Januari 2023		

c. Dokumen Keuangan

Pada submenu ini membantu dalam pengadministrasian dan penyusunan dokumen keuangan, sehingga jika diperlukan lebih mudah untuk mencari dokumen keuangan tersebut.

Gambar 3.6. Tampilan submenu dokumen keuangan pada aplikasi SITUAH



d. Pengajuan Tunjangan Kinerja

Pada submenu ini pengadministrasi keuangan dapat membuat pengajuan tunjangan kinerja dengan data yang bersumber dari admin kepegawaian.

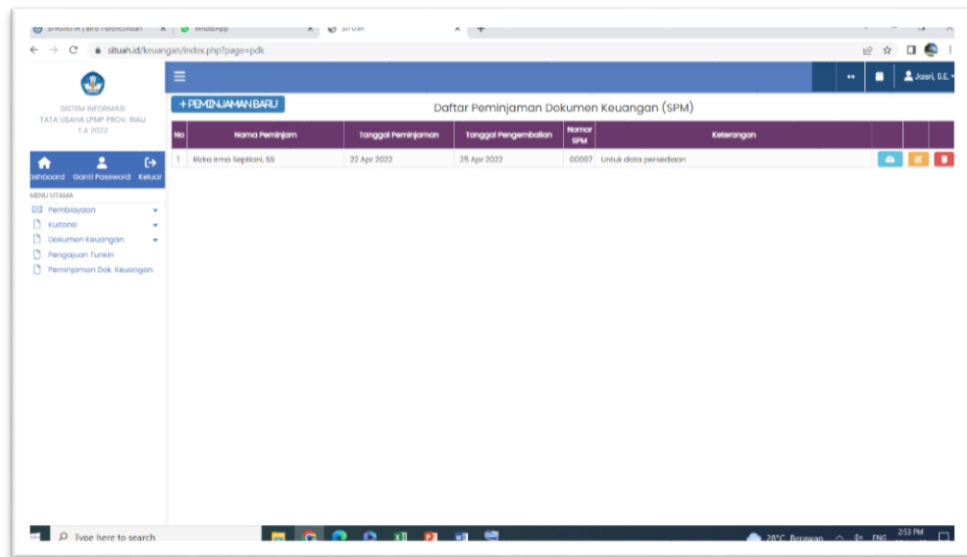
Gambar 3.7. Tampilan submenu pengajuan tunjangan kinerja pada aplikasi SITUAH

No	Nama	Tunjangan	% Kuantitas Komp. Capaian	PKK/ Hadr	Nilai Capaian	Nilai Komponen	Potongan	Bruto	PPH 21	Netto
Jumlah										
1	Agustina Eka Saputri, S.Si., M.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Arsoli, M.Ed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Benny Hendriat Eka Putra, S.Sos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dessy Rosa Linda, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Devi Andayani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Devi Septian Sari Tugan, S.H., M.H.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Denny Fikriani, S.Si, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Diyekpa, SE, Ak.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	dr. Guatmar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dr. Wima Endrimon, M.Pd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dr. Yusra Albal Kahar, S.Kom., M.Kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dra. Deo Mandani, M.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dra. Linda Andar, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dra. Mariani	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e. Peminjaman Dokumen Keuangan

Pada submenu ini memudahkan pengadministrasian dokumen keuangan yang dipinjam oleh operator aset atau persediaan untuk kepentingan pelaporan.

Gambar 3.8. tampilan submenu peminjaman dokumen keuangan pada aplikasi SITUAH



2. Penghargaan

BPMP Provinsi Riau memperoleh predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kemendikbudristek.

Gambar 3.9. Piagam Penghargaan predikat ZI-WBBM berdasarkan penilaian Kemendikbudristek



3. Program *Crosscutting / Collaborative*

Pada tahun 2022, BPMP Provinsi Riau melakukan program *crosscutting / collaborative* dengan mitra kerja sebagai berikut:

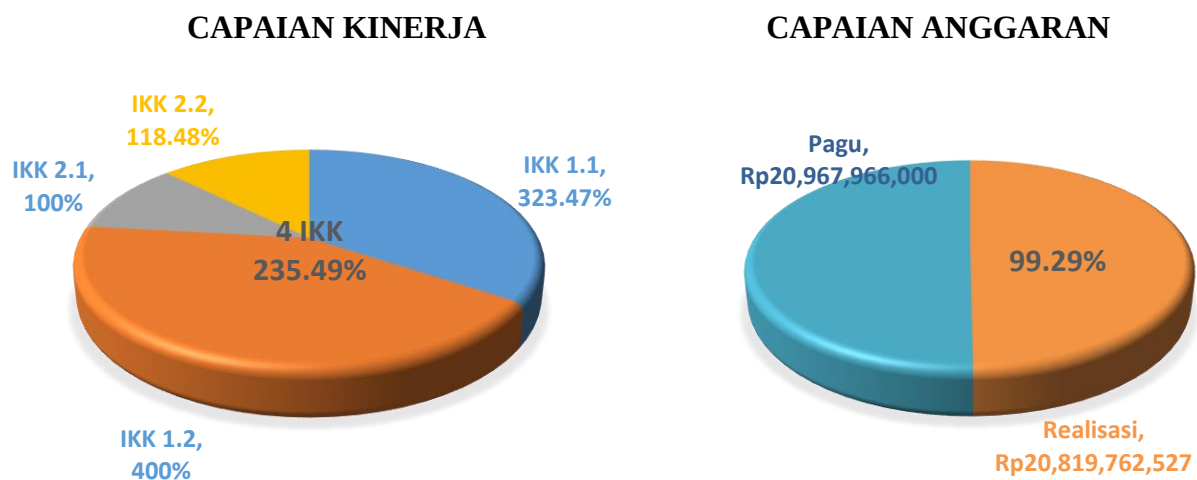
- a. Tanoto Foundation
BPMP Provinsi Riau berkolaborasi dalam pelaksanaan program strategis prioritas Kemendikbudristek yakni program merdeka belajar. Terutama Kabupaten/Kota sasaran Tanoto Foundation yang beririsan dengan Kabupaten/Kota sasaran BPMP Provinsi Riau. Antara lain:
 - Peningkatan perencanaan berbasis data berdasarkan platform rapor Pendidikan
 - Percepatan pembuatan regulasi pemerintah daerah seperti PERWAKO atau PERBUP terkait merdeka belajar
- b. Balai Guru Penggerak
Kolaborasi dan pelaksanaan program prioritas Kemdikbudristek sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
- c. Universitas Riau
Penunjang kegiatan program kampus mengajar provinsi Riau Angkatan III dan IV.

BAB IV

Penutup

Kinerja BPMP Provinsi Riau pada tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 235,49% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian 3 dari 4 IKK adalah >100% sementara 1 IKK sama dengan 100%. Capaian kinerja tersebut juga didukung kinerja keuangan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 20.819.762.527,- atau 99,29% dari total pagu sebesar Rp 20.967.966.000,-.

Grafik 3.8. Capaian kinerja dan capaian anggaran BPMP Provinsi Riau tahun 2022



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Belum ada SDM di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dikarenakan adanya restrukturisasi lembaga di Kemendikbudristek;
2. Perlunya SDM yang memahami konten Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Kondisi geografis beberapa kabupaten di Provinsi Riau yang sulit dijangkau;
4. Masih kurangnya kontribusi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pemetaan dan penataan satuan pendidikan yang non aktif sehingga mempengaruhi persentase pengiriman pada Dapodik;
5. Rencana kegiatan yang belum tergambar secara jelas diawal tahun anggaran sehingga pelaksana kegiatan sangat perlu menafsirkan sendiri tujuan, bentuk, teknis dan sasaran kegiatan;
6. Nilai EKA yang masih rendah jika dibandingkan dengan nilai IKPA.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Mendorong untuk segera dilakukan mutasi/perekrutan SDM dibidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

2. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan mitra terkait lain, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pendataan, implementasi program dan anggaran program;
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang ditargetkan;
4. Membuat manajemen resiko agar pencapaian target kinerja dapat terlaksana sesuai rencana secara efektif dan efisien di awal tahun;
5. Melakukan evaluasi internal mengenai capaian kinerja lembaga secara berkala atas progress capaian target.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Plt Kepala LPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
2. Pengukuran Kinerja Plt Kepala LPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Plt. Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Pengukuran Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
5. Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Pengukuran Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
7. Daftar Program dan kegiatan BPMP Provinsi Riau
8. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

1. Perjanjian Kinerja Plt Kepala LPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Plt. Kepala LPMP Provinsi Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

Jabatan : Plt. Kepala LPMP Provinsi Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Plt. Kepala LPMP Provinsi Riau



Jumeri, S.TP.,M.Si.



Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Pengukuran Kinerja Plt Kepala LPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau	83



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3. Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Plt. Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BPMP Provinsi Riau**

Dengan

Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wisma Endrimon, M.Pd

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah**

Kepala BPMP Provinsi Riau



Dr. Iwan Syahril, Ph.D.



Dr. Wisma Endrimon, M.Pd



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Pengukuran Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	83



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

5. Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BPMP Provinsi Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wisma Endrimon, M.Pd

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Pekanbaru, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Riau,



Iwan Syahril



Dr. Wisma Endrimon, M.Pd



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Pengukuran Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	83



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

7. Daftar Program dan kegiatan BPMP Provinsi Riau

NO	IKK	KEGIATAN	TGL PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN
A	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkatkan rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	1. Pelaksanaan perencanaan dan persiapan kegiatan melalui rapat penysunan dan koordinasi		
	TW 1	2. Sosialisasi ke pemerintah daerah	Tgl 7 - 8 Februari 2022.	kabupaten Rohul, Inhu, Kampar, Bengkalis, Pekanbaru dan Provinsi Riau angkatan 3 melalui Zoom Meeting
		3. Coaching Klinik Pemerintah daerah Program Sekolah Penggerak Tahap 3 Tahun 2022,	Rohul 14-15 Feb 2022, Kampar 14-15 Feb 2022, Bengkalis 14 dan 16 Feb 2022, Pekanbaru 18, 20 dan 21 Feb 2022, Inhu 23-24 Feb 2022, Meraanti 23, 24 dan 28 Feb 2022,	
		4. Zoom DAK	25 Mar 2022,	BPMP Provinsi Riau
		5. Advokasi dan sosialisasi pedoman Pembelajaran Paradigma Baru	28-29 Mar 2022,	BPMP Provinsi Riau
		6. Advokasi dan sosialisasi pedoman peningkatan kompetensi literasi dan numerasi	28-29 Mar 2022	BPMP Provinsi Riau
		7. Sosialisasi merdeka belajar	31 mar 2022	BPMP Provinsi Riau
		8. FGD review dan upgrade aplikasi Si-Tuah	21, 22 dan 25	BPMP Provinsi Riau
	TW 2	1. Forum Pemangku Kepentingan Akt 1 tahun 2022	Kabupaten Siak 15 Juni 2022, Kota Dumai, 16	

			Juni 2022 Indragiri Hilir tanggal 16 s.d 17 Juni dan 17 s.d 18 Juni 2022	
		2. Rakortek Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara Daring	27 Mei 2022	BPMP Provinsi Riau
		3. Implementasi Pedoman Pembelajaran Paradigma Baru	23 Juni 2022	di 12 Kabupaten/Ko ta
		4. Bimtek Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data	27 s.d 29 Juni 2022.	di 12 Kabupaten/Ko ta
	TW 3	1. Forum Pemangku Kepentingan Akt	Kabupaten Siak tanggal 15 Juni 2022, Kota Dumai tanggal 16 Juni 2022, serta Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 s.d 17 Juni dan 17 s.d 18 Juni 2022	Kabupaten Siak tanggal 15 Juni 2022, Kota Dumai tanggal 16 Juni 2022, serta Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 s.d 17 Juni dan 17 s.d 18 Juni 2022
		2. Rakortek Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara Daring	27 Mei 2022;	BPMP Provinsi Riau
		3. Implementasi Pedoman Pembelajaran Paradigma Baru di	12 Kab./Kota	27 Mei 2022;
		4. Bimtek Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Bagi Pemerintah Daerah	12 Kab./Kota	27 s.d 29 Juni 2022.
	TW4	1. Pendampingan Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Satuan Pendidikan ke Sekolah Penggerak Akt. 2	29 September s.d 01 Oktober 2022	28 Sekolah
		2. Pendampingan Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Satuan Pendidikan PSP Akt. 2	12 s.d 15 Oktober 2022	
		3. Pendampingan Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Satuan Pendidikan Program Sekolah Penggerak Akt. 2	23 s.d 29 Oktober 2022	

		4. Festival Lokal Belajar ID	16 s.d 17 November 2022	
		5. Bimbingan Teknis Program Sekolah Penggerak ke Pemda	17 s.d 19 November 2022	
		6. Fasilitasi dan Pendampingan Penguatan SDM	21 s.d 23 November 2022	7 Kab/Kota
		7. Pendampingan Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Satuan Pendidikan Ke Sekolah Penggerak Angkatan	11 s.d 15 Desember 2022	Kab/Kota Prov Riau
B.	[IKK 2.1] Predikat SAKIP			
	TW 1	1. Mancakrida peningkatan kompetensi pegawai LPMP Provinsi Riau tgl 21-24 Mar 2022		
		2. Rapat internal membahas capaian kinerja lembaga		
		3. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik		
	TW 2	1. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program BPMP Provinsi Riau dan Pemda tanggal 27 sd 29 Juni 2022;		
		2. Rapat internal membahas capaian kinerja lembaga;		
		3. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik.		
	TW 3	1. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program BPMP Provinsi Riau dan Pemda tanggal 27 sd 29 Juni 2022;		
		2. Rapat internal membahas capaian kinerja lembaga; 3. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik.		
	Tw 4	1. Ngobrol Pintar Online (NGOPI-O) dengan Tema "Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Mengajar"	26 November 2022;	
		2. Diseminasi Hasil Kemitraan dan Kerjasama Berdasarkan Profil Pendidikan	15 s.d 17 Desember 2022;	
		3. Benchmarking (Patok Banding) Pegawai BPMP Prov. Riau ke BPMP Prov. Kepulauan Riau	25 s.d 27 Desember 2022;	
		4. Rapat internal membahas capaian kinerja lembaga;		
		5. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik.		

C.	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran			
	TW 1	1. Pembelian printer label LPMP Riau bulan Maret 2022		
		2. Robin home		
		3. Selang isap		
		4. Pembayaran gaji dan tunjangan		
		5. Pembayaran honorarium operasional satker		
		6. Pemabayaran keperluan kantor		
		7. Melakukan pemantauan terhadap nilai EKA di aplikasi Spasi kita,		
	TW 2/ TW 3/ TW 4	1. Pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan pegawai serta honorarium tenaga PPNNP;		
		2. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja;		
		3. Pembiayaan Keperluan Perkantoran;		
		4. Melakukan pemantauan terhadap nilai EKA di aplikasi Spasikita dan IKPA di OM SPAN.		

8. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BPMP PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI RIAU untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI RIAU.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 30 Januari 2023
Ketua Tim Reviu



Irfan, S.Sos
196909012001121002

